



Media: Harian Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 25 Mei 2021

Halaman: 1

► EKS BIOSKOP INDRA

Jangan Seperti Mindah Ikan ke Akuarium

Tanpa Air

Bangunan tiga lantai di lahan eks Bioskop Indra digadang-gadang sebagai sentra Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Malioboro. Namun sampai saat ini PKL Malioboro belum mengetahui kabar akan direlokasi ke eks Bioskop Indra. Berikut laporan wartawan Harian Jogja, Ujang Hasanudin.

Bangunan di atas lahan eks Bioskop Indra di Jalan Malioboro, masih sepi pada Rabu (19/5) siang. Tidak ada tanda-tanda aktivitas di bangunan tiga lantai tersebut. Bahkan pintu masuk area bangunan yang masih menjadi sengketa dengan ahli waris eks Bioskop Indra tersebut masih terkunci rapat dengan gembok dan rantai.

Dua juru parkir di dekat bangunan tersebut sempat mendatangi *Harian Jogja* dan bertanya maksud dan tujuan mengunjungi bangunan eks Bioskop Indra. "Mau ngapain ke sini [eks Bioskop Indra], kawasan ini sudah lama dikunci," kata lelaki bertubuh gempal dan bertato. Dia menyarankan jika ingin bertanya-tanya mengenai bangunan tersebut, sebaiknya ke Dinas



Harian Jogja/Ujang Hasanudin

Eks gedung Bioskop Indra yang telah berdiri bangunan baru yang akan difungsikan menjadi sentra UMKM.

Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP-ESDM).

Juru parkir lainnya menyarankan agar menemui ahli waris eks Bioskop Indra, Sukrisno Wibowo. *Harian Jogja*, kemudian menemui sejumlah PKL di sekitar Malioboro. Namun para PKL tersebut tidak mengetahui akan ada relokasi. "Belum tahu kalau [mau]

ada relokasi, belum ada sosialisasi sama sekali," ucap Deddy Irawan, salah satu penjual pakaian di depan Mirota Batik.

Ia tidak mengungkapkan setuju dan tidaknya jika direlokasi ke eks Bioskop Indra. Deddy masih menunggu kepastian dari Pemda DIY atau Pemerintah Kota Jogja. Namun dia menyampaikan selama ini Malioboro identik dengan PKL

sehingga Deddy meminta pemerintah mempertimbangkan ulang jika ingin merelokasi PKL.

Ketua Koperasi Tri Dharma atau wadiah salah satu kelompok PKL Malioboro, Rudiarto juga mengatakan baru mengetahui eks Bioskop Indra untuk sentra UMKM dan PKL Malioboro dari media massa. Namun PKL mana yang akan direlokasi dia belum mengetahui. Ia juga belum tahu kapasitas bangunan di eks Bioskop Indra tersebut.

"Sementara ini kami belum bersikap karena kami memang belum jelas, PKL mana? Dengan kemampuan dan kapasitas yang ada pun saya kira perlu dikomunikasikan lebih lanjut dengan PKL karena memang belum ada sosialisasi," kata Rudiarto.

Saat saya menanyakan apakah ia bersedia direlokasi, Rudiarto mengatakan akan menolaknya. Sebab, para PKL masih bingung bagaimana dengan kondisi di eks Bioskop Indra, apakah bisa laku atau tidak dagangan PKL karena sampai sekarang belum ada jaminan dari pemerintah.

► Halaman 10

Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
☐ Negatif	☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
☐ Positif	☐ Segera	☐ Untuk Diketahui
☐ Netral	☐ Biasa	☐ Jumpa Pers

Yogyakarta,
Kepala

Ttd

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005

Jangan Seperti...

Ia berharap jika pemerintah mau merelokasi PKL agar menyosialisasikannya terlebih dahulu. "Tanpa PKL saya kira akan jadi apa ya mungkin jadi kurang menarik sebetulnya karena selama ini menurut pandangan PKL dan saya sendiri, menariknya Malioboro memang adanya ingar bingar dari PKL itu sendiri. Kalau tidak ada PKL jalan Malioboro tidak ubahnya jalan-jalan di kota lain yang hanya sebatas lalu-lintas manusia tanpa ada pernah parkir [khas]," ucap Rudiarto.

Rudiarto memaparkan secara keseluruhan terdapat lebih dari 1.500 PKL di Malioboro. Di bawah Paguyuban Tri Dharma ada 920 orang. Jumlah itu belum termasuk Paguyuban PKL Malioboro Ahmad Yani (Pamalni) yang anggotanya lebih dari 400 orang; PKL depan Kepatihan hingga Inna Garuda sekitar 150-an; dan PKL 37 atau depan Pasar Sore Malioboro sekitar 100-an orang.

Ketua Paguyuban PKL Malioboro Ahmad Yani (Pamalni), Slamet Santoso juga menyatakan hal serupa. Sepengetahuannya dia, eks Bisokop Indra memang akan difungsikan sebagai sentra UMKM, kuliner, dan tempat usaha di kawasan Malioboro. Adapun untuk sentra kerajinan dan pakaian yang selama ini tergabung dalam Pamalni belum mendapat sosialisasi akan direlokasi.

"Selama ini dari dulu belum ada sosialisasi mau di arahkan ke situ [eks Bioskop Indra] apalagi kuota eks Bioskop Indra terbatas hanya 250 PKL maksimal 300 PKL. Padahal kalau Malioboro jumlah PKL mencapai 1.700-an PKL," kata Slamet.

Ia belum berani menyatakan siap dan tidaknya jika direlokasi, tetapi jika relokasi tersebut menguntungkan bagi PKL, Slamet tidak mempersoalkan. Namun dia khawatir pemindahan PKL justru akan mematikan PKL. "Jangan sampai pemindahan seperti memindah ikan ke akuarium yang tidak ada airnya, mematikan PKL," ucap dia.

Menurut dia, jika merujuk

dari sejarah ramainya Malioboro karena ada PKL. Bahkan dalam sosialisasi dengan Pemda DIY saat penataan kawasan Malioboro dulu, Pemda DIY sempat menyatakan bahwa PKL di Malioboro tetap ada. Hanya akan ditata. Selama ini PKL Malioboro juga mengikuti penataan tersebut dan tidak ada yang protes. Namun jika mau dipindahkan sampai saat ini belum ada sosialisasi. Bagi dia yang penting menguntungkan bagi PKL.

Saat ini PKL yang tergabung dalam Pamalni ada 450 PKL dari Jalan Malioboro sampai Jalan Ahmad Yani. Sebanyak 444 PKL sudah berizin dan masuk paguyuban, sedangkan enam PKL lainnya belum masuk paguyuban.

Sebelumnya, Sekda DIY, Baskara Aji mengatakan tahun ini Pemda DIY bersama dengan Pemerintah Kota Jogja berencana untuk memindahkan PKL di Malioboro ke sentra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di eks Bioskop Indra. Pemindahan PKL tersebut dilakukan karena Pemda DIY sudah menang dalam pengadilan melalui putusan Peninjauan Kembali (PK) atas ahli waris eks Bioskop Indra.

"Dinas UMKM bersama-sama dengan pemerintah kota baru mendata UMKM yang masuk ke sana [eks Bioskop Indra]. Peruntukannya UMKM, tapi pedagang Malioboro juga menjadi prioritas," kata Baskara Aji.

Baskara Aji mengatakan saat ini masih dikaji komposisi PKL Malioboro yang akan dipindah ke sentra UMKM. Apakah dagangan sejenis, dagangan bermacam-macam. Nantinya, relokasi PKL Malioboro akan dilakukan secara bertahap. Nanti yang menentukan adalah Dinas Koperasi UKM dan Pemkot Jogja.

PK Balik

Namun dari sisi lain, ahli waris eks Bioskop Indra juga masih akan tetap mempertahankan lahannya dengan mengajukan PK kembali atas PK yang memenangkan Pemda DIY. Sukrisno Wibowo selaku

ahli waris menilai putusan PK Mahkamah Agung (MA) multitafsir sehingga pihaknya kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan PK tersebut.

PK diajukan pada 21 April 2021 lalu. Sukrisno mengatakan novum atau bukti baru dalam putusan PK yang memenangkan Pemda DIY sudah pernah diujikan dalam pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat tinggi, maupun kasasi yang dimenangkan ahli waris. "Novumnya itu kan sebenarnya sudah digunakan di PTUN Jogja, sudah dibanding, dikasasi masa ada novum baru jadi kayak lucu," ucap dia.

Sukrisno pun akan memper-tahankan lahan eks Bioskop Indra. "Oh iya memang haknya kok masa dibiarkan saja," kata Sukrisno.

Ia menegaskan kepemilikan atas Bioskop Indra nyata-nyata merupakan hak ahli waris dengan bukti kepemilikan eigendom verponding 504 yang dijadikan saham di NV. Jvasche Bioscoop En Bouw Maatschappij (NV. JBBM). Saat ini seluruh saham NV. JBBM itu dipegang oleh ahli waris.

Untuk mengajukan bukti kepemilikan dalam Peninjauan Kembali tersebut Sukrisno mengajukan tujuh bukti baru yang memperkuat kepemilikan saham di NV. JBBM dan satu putusan pengadilan Nomor 19/Pdt.G/2007/PN YK tertanggal 8 Oktober 2007 juncto Nomor 8/Pdt/2008/PT.YK tertanggal 30 April 2008, juncto Nomor 2081 K/Pdt/2008 tertanggal 20 Juli 2010 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menguatkan bahwa harta-harta termasuk Bioskop Indra adalah harta NV. JBBM yang belum diberekskan.

"Jelas dan nyata bahwa tanah eks Bioskop Indra adalah milik ahli waris," ujar Sukrisno. "Pengadilan sudah menang terus, sudah dibuktikan di pengadilan tiga kali sama MA, dibuat gini kan kayak ambigu ya. Jadi intinya saya ingin menguatkan kembali putusan MA," kata Sukrisno.

(hasanudin@harlanjogja.com)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005